

Artikel : [Akses terbuka/Open Access](#)

**DETERMINAN KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR)**

Sitasi : Jewaru & Siagian. 2022, JSTAR 2(1), 71-86.

Kronologi naskah.

Submit : 11 Mei 2022

Revisi : 22 Juni 2022

Diterima : 22 Juni 2022



Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk
Indonesia Maju

REFORMASI BIROKRASI



DETERMINAN KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR)

Dyonisius H S Jewaru¹, Ervina Jayanti Siagian²

¹Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

²Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

*korespondensi author: dyo.jewaru@bps.go.id¹, ervina.jayanti@bps.go.id²

Abstract

Economic development is currently moving from a pro-poor growth paradigm to inclusive economic development. Its main sub-pillars include reducing inequality and reducing poverty. These indicators are quite complex and multidimensional. NTT Province is in the top 5 provinces with the lowest inequality and poverty reduction index in Indonesia. The main problem is the slow growth of inequality and poverty reduction. In addition, there is a large gap in inequality and poverty between regencies/cities compared to NTT and national figures. This study aims to analyze the determinants of reducing inequality and poverty within the framework of inclusive economic development in all regencies/cities and underdeveloped regencies in NTT in 2015-2021. Regression analysis of panel data using a fixed effect model found that the significant factors that determine inequality reduction are economic growth, economic infrastructure, and expansion of access and opportunities. However, economic growth does not significantly affect the reduction of inequality in underdeveloped districts in NTT. Meanwhile, significant factors that determine the level of poverty reduction are job opportunities, economic infrastructure, and expansion of access and opportunities.

Keyword: Poverty, Inequality, Inclusive Economic Development, Underdeveloped Regions

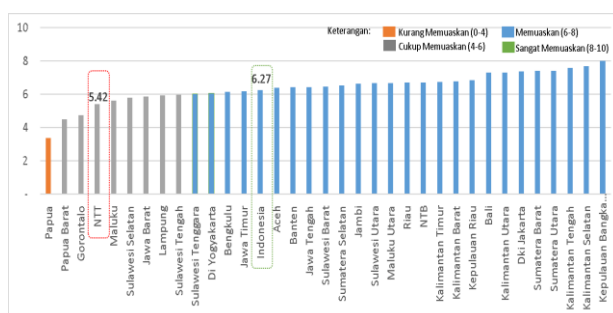
1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi saat ini bergerak dari paradigma pro poor growth (PPG) ke pembangunan ekonomi inklusif (Adeleye et al., 2017). Paradigma ini didukung oleh Kakwani (2000) yang mendefinisikan PPG sebagai peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Namun, jika masyarakat miskin mendapat manfaat tetapi tidak ikut serta dalam proses pertumbuhan maka ketimpangan akan

semakin melebar. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi inklusif menjadi solusi pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat miskin tidak hanya diuntungkan, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pergeseran paradigma pemerintah Indonesia terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs). Poin kedelapan dalam SDGs menargetkan

terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang layak bagi semua (UNDP, 2017). Capaian ini diukur dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

IPEI pilar kedua menyajikan indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (IPPK). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2022) menunjukkan adanya ketimpangan IPPK antar daerah di Indonesia (gambar 1). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan dalam lebih dari 5 tahun terakhir karena selalu menempati 5 besar provinsi dengan IPPK terendah di Indonesia. IPPK NTT sejak tahun 2015 meningkat sebesar 1,26 poin hingga tahun 2021 mencapai 6,01. Dengan kata lain, rata-rata IPPK NTT pada tahun 2015-2021 sebesar 5,42 (masuk dalam kategori *cukup memuaskan*). Sementara itu, rata-rata IPPK Indonesia pada tahun yang sama sebesar 6,27 (masuk dalam kategori *memuaskan*).

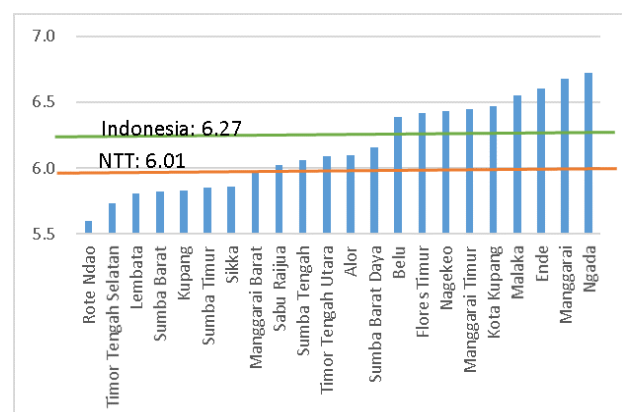


Gambar 1. Rata-rata Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan (IPPK) menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Masalah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di NTT digambarkan oleh lambatnya pertumbuhan indeks ketimpangan dan indeks kemiskinan NTT. Indeks ketimpangan NTT bertambah 0,35 poin selama tahun 2015-2021 atau lebih lambat dibandingkan indeks ketimpangan nasional yang bertambah 0,80 poin. Sementara itu, indeks kemiskinan NTT bertambah 1,85 poin sejak tahun 2015 hingga mencapai 5,47 pada tahun 2021. Penanggulangan kemiskinan di NTT relatif lambat untuk mengejar indeks kemiskinan nasional tahun 2021 yang mencapai 7,89.

Tantangan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di NTT semakin besar akibat *gap* IPPK pada level kabupaten/kota. Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 22 kabupaten/kota di NTT, 8 kabupaten memiliki IPPK lebih rendah dari IPPK NTT dan 13 kabupaten memiliki IPPK lebih rendah dari IPPK Indonesia.



Gambar 2. Rata-rata IPPK menurut Kabupaten/Kota di NTT, 2015-2021

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Pemerintah Indonesia merespon *gap* pembangunan daerah ini dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 (Setkab, 2022). Kebijakan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat dilihat dari kriteria kabupaten tertinggal dalam Perpres Nomor 131 Tahun 2015 yang hampir semuanya diakomodasi dalam indikator pembangunan ekonomi inklusif. Kriteria tersebut adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, dan karakteristik daerah. Ramos *et al.* (2013) menjelaskan peran pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesempatan kerja dan dapat memaksimalkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (dimensi *participation*) sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (dimensi *benefit sharing*).

Masalah kemiskinan dan ketimpangan secara nasional maupun regional secara resmi masih diukur melalui satu dimensi saja, yakni dimensi moneter atau pendapatan. Dalam dimensi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran (BPS, 2022). Namun, wujud kemiskinan dan ketimpangan seiring waktu menjadi lebih kompleks sehingga indikator tunggal tersebut mendapat banyak kritik (Aidha, C. N. *et al.*, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensi dengan indeks pemerataan pendapatan (indeks ketimpangan) dan indeks pengurangan kemiskinan (indeks kemiskinan).

Berbagai penelitian di negara berkembang, termasuk di Indonesia, menemukan hasil yang berbeda terkait determinan ketimpangan dan kemiskinan. Penelitian Fosu (2015) pada negara-negara Afrika sub-Sahara dan Anand *et al.* (2014) di India menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Sejalan dengan itu, McKinley (2010) mengidentifikasi bahwa pertumbuhan inklusif menciptakan dan memperluas peluang ekonomi serta memastikan akses peluang yang lebih luas sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan menurun. Sementara itu, Ahlin & Jiang (2008) berpendapat bahwa akses keuangan melalui kredit mikro mengurangi ketimpangan dan kemiskinan jangka panjang. Penelitian pada level regional di Indonesia yang dilakukan oleh Christiani & Nainupu (2021) menunjukkan bahwa secara simultan PDRB per kapita, akses internet dan penerangan listrik berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di NTT pada tahun 2015-2019.

Pertumbuhan ekonomi menjadi determinan yang paling umum diteliti di negara berkembang. Studi yang dilakukan Adeleye *et al.* (2020) pada negara-negara sub-Sahara, Amerika Latin, dan negara-negara Karibia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kontributor dalam penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, interaksi yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan akan memperburuk tingkat kemiskinan. Hal yang menarik adalah ketimpangan pendapatan justru dapat meredam pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Istiqamah *et al.* (2018) pada provinsi-provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Penelitian terkait determinan tingkat ketimpangan dan kemiskinan secara komprehensif dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif belum banyak dilakukan, khususnya pada level regional di Indonesia. Kerangka tersebut mencakup pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dan pilar akses dan kesempatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor apa yang signifikan menjadi determinan tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di NTT; 2) faktor-faktor apa yang signifikan menjadi determinan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di NTT.

Analisis determinan ketimpangan dan kemiskinan dilakukan pada model seluruh daerah di NTT dan model khusus daerah tertinggal di NTT.

2. Metodologi

Bahan dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Provinsi NTT. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah seluruh daerah (21 kabupaten/kota) di NTT. Kelompok kedua adalah daerah tertinggal di NTT (17 Kabupaten) berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal. Daerah yang tidak termasuk dalam kelompok 2 adalah Kota Kupang, Flores Timur, Sikka, dan Ngada. Sementara itu, Kabupaten Malaka tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena datanya tidak tersedia untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder IPEI dari Bappenas dan rata-rata lama sekolah (RLS) dari BPS. Jenis data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota di NTT tahun 2015-2021. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (IPPE). Indeks ini merupakan pilar pertama IPEI. IPPE terdiri dari 3 sub-pilar, yaitu:
 - a. Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPE). IPE dibentuk dari indikator pertumbuhan PDRB riil per kapita,

- share* manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal.
- b. Indeks Kesempatan Kerja (IKK). IKK dibentuk dari indikator tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja penuh, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.
 - c. Indeks Infrastruktur Ekonomi (IIE). IIE dibentuk dari indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, dan persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.
- 2) Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan (IPPK). Indeks ini merupakan pilar kedua IPEI. IPPK terdiri dari 3 sub-pilar, yaitu:
- a. Indeks Ketimpangan (IK1). IK1 dibentuk dari indikator rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota.
 - b. Indeks Kemiskinan (IK2). IK2 dibentuk dari indikator persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.
- 3) Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan (IPAK). Indeks ini merupakan pilar ketiga IPEI. IPAK terdiri dari 3 sub-pilar, yaitu:

- a. Indeks Kapabilitas Manusia
 - b. Indeks Infrastruktur Dasar
 - c. Indeks Keuangan Inklusif
- 4) RLS, yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal

Data sub-pilar IPAK tidak tersedia pada level kabupaten/kota di NTT sehingga analisis dalam penelitian ini terbatas pada level pilar IPAK. Klasifikasi nilai indeks seluruh komponen IPEI dikembangkan dari klasifikasi Bappenas (2022) dan dibagi dalam 4 kategori yaitu kurang memuaskan (nilai <4), cukup memuaskan (nilai 4-6), memuaskan (nilai 6-8), dan sangat memuaskan (nilai 8-10).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan kuadran untuk menggambarkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan serta hubungannya dengan pilar IPEI. Analisis inferensia digunakan menganalisis pengaruh pilar IPEI terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan program pengolahan *evIEWS*.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari model Kouadio dan Gakpa (2021) dan model Mushtaq dan Bruneau (2019). Kouadio dan Gakpa membangun model ketimpangan dan kemiskinan dari aspek pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi. Sementara itu, Mushtaq dan Bruneau membangun modelnya dari aspek perluasan akses dan kesempatan. Kedua model tersebut saling melengkapi dan mencakup 2 persamaan untuk menganalisis determinan ketimpangan dan kemiskinan, baik pada semua daerah maupun daerah tertinggal di NTT.

Model regresi dalam penelitian ini:

$$IK1_{it} = (\alpha + \mu_i) + \beta_1 IPE_{it} + \beta_2 IKK_{it} + \beta_3 IIE_{it} + \beta_4 IPAK_{it} + \beta_5 RLS_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$IK2_{it} = (\alpha + \mu_i) + \beta_1 IPE_{it} + \beta_2 IKK_{it} + \beta_3 IIE_{it} + \beta_4 IPAK_{it} + \beta_5 RLS_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Keterangan:

IK1 : Indeks Pemerataan Pendapatan (Indeks Ketimpangan)

IK2 : Indeks Pengurangan Kemiskinan (Indeks Kemiskinan)

i : kabupaten/kota di NTT (21 kabupaten/kota untuk model semua daerah; 17 kabupaten untuk model daerah tertinggal)

t : tahun 2015-2021

β_k : koefisien regresi ($k=1,2,3,4,5$)

$(\alpha + \mu_i)$: efek spesifik kabupaten/kota

ε_{it} : residual model untuk kabupaten ke *i* pada tahun ke *t*

IPE : Indeks Pertumbuhan Ekonomi

IKK : Indeks Kesempatan Kerja

IIE : Indeks Infrastruktur Ekonomi

IPAK: Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan

RLS : Rata-rata lama sekolah

RLS merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini yang diadopsi penelitian Wu & Ramesh (2014) terkait kemiskinan di China.

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan uji tersebut diketahui bahwa model terbaik untuk mengestimasi tingkat kemiskinan (1) semua daerah dan daerah tertinggal di NTT adalah dengan *fixed effect model* (FEM). Sebaliknya, model terbaik untuk mengestimasi tingkat ketimpangan (2) semua daerah dan daerah tertinggal di NTT adalah dengan *random effect model* (REM). Namun untuk mengatasi permasalahan *omitted variable bias* atau variabel terkait lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian, maka semua model estimasi dalam penelitian ini menggunakan metode *fixed effect*.

FEM lebih meyakinkan dibandingkan REM untuk analisis kebijakan menggunakan data agregat. Wooldridge (2015) menyarankan menggunakan FEM karena pada penelitian level geografis (negara, provinsi, dan kabupaten), FEM mengakomodasi *unobserved unit effect* (a_i) sebagai *intercept* yang terpisah untuk estimasi setiap *unit cross-section*. Model ini juga digunakan dalam studi Wagle (2016), dimana perbedaan efek antar negara dapat tertangkap dengan baik serta dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi akibat adanya *omitted variable bias*.

Metode estimasi yang tepat untuk FEM ditentukan setelah pengujian struktur varians-kovarians residual. Uji *Lagrange Multiplier* (*LM test*) menunjukkan struktur varians-kovarians residual bersifat heteroskedastis. Setelah itu, uji *cross-sectional correlation* (λLM

test) menunjukkan bahwa struktur varians-kovarians residual bersifat heteroskedastis dan terdapat *cross-sectional correlation* baik pada model IK1 maupun IK2. Oleh karena itu, metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Feasible Generalized Least Square* atau FGLS (Greene, 2012).

Pengujian asumsi klasik, seperti homoskedastisitas dan non-autokorelasi, tidak dapat digunakan dalam estimator FGLS karena tidak lagi relevan dengan konsep pengujian asumsi klasik pada regresi OLS. Namun, uji normalitas dan multikolinieritas akan tetap dilakukan (Ekananda, 2016). Uji normalitas (uji Jarque-Bera) pada tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan bahwa semua model dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal. Sementara itu, model dalam penelitian ini juga tidak melanggar asumsi non-multikolinearitas karena korelasi antar variabel bebas kurang dari 90 persen (Ghozali, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Ketimpangan dan Kemiskinan dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif NTT secara umum terus meningkat dan berada dalam rentang kategori *cukup memuaskan*¹ selama tahun 2015-2021. Hal itu tidak terlepas dari peningkatan inklusivitas pembangunan di NTT

melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Tabel 1 menunjukkan rata-rata IPPK daerah di NTT masuk dalam kategori *cukup memuaskan*. Hal itu tidak terlepas dari rata-rata tingkat pengurangan kemiskinan (IK2) yang berada pada kategori *memuaskan*². Meskipun demikian, rata-rata tingkat pemerataan pendapatan (IK1) masih berada pada kategori *cukup memuaskan*.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	IPPK		IK1		IK2		IPE		IKK		IIE		IPAK	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Mean	5.98	5.89	5.11	5.09	7.03	6.84	2.37	2.34	6.14	6.02	4.75	4.47	5.31	5.10
Median	5.94	5.89	5.10	5.07	7.00	6.85	2.36	2.31	6.10	6.05	4.78	4.64	5.14	5.05
Max	7.12	6.92	6.40	6.40	8.80	8.17	2.73	2.69	7.88	7.02	7.98	6.22	7.71	6.83
Min	4.93	4.93	4.09	4.09	5.20	5.20	1.93	1.93	4.64	4.64	2.50	2.50	3.68	3.68
Std. Dev	0.45	0.41	0.50	0.51	0.70	0.61	0.17	0.16	0.53	0.41	1.11	0.93	0.78	0.69
obs	147	119	147	119	147	119	147	119	147	119	147	119	147	119

Keterangan: 1) Seluruh Daerah di NTT;

2) Daerah Tertinggal di NTT

Sumber: Output pengolahan *evIEWS*

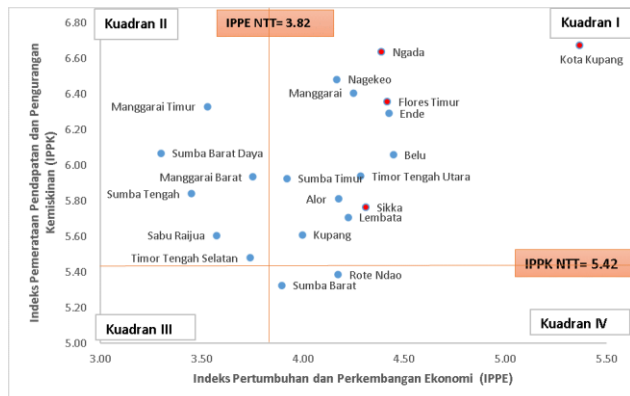
IK1 dan IK2 daerah di NTT meningkat seiring Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, serta perluasan akses dan kesempatan. Tabel 1 menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi (IPE) daerah di NTT *kurang memuaskan*³, infrastruktur ekonomi (IIE) *cukup memuaskan*, dan kesempatan kerja (IKK) *memuaskan*. Sementara itu, perluasan akses dan kesempatan (IPAK) daerah di NTT *cukup memuaskan*. Selain itu, disparitas capaian pembangunan ekonomi inklusif antar daerah di NTT cukup tinggi. BPS NTT (2021) dalam publikasi *Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2021* menjelaskan bahwa

¹ Indeks cukup memuaskan: nilai 4-6

² Indeks memuaskan: nilai 6-8

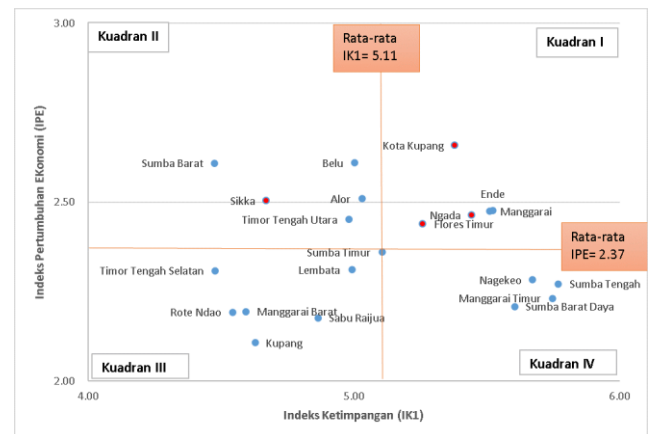
³ Indeks kurang memuaskan: nilai 0-4

ketimpangan antar wilayah di NTT terjadi akibat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah (34,27 persen) dan rendahnya angka kemiskinan di Kota Kupang (9,17 persen).

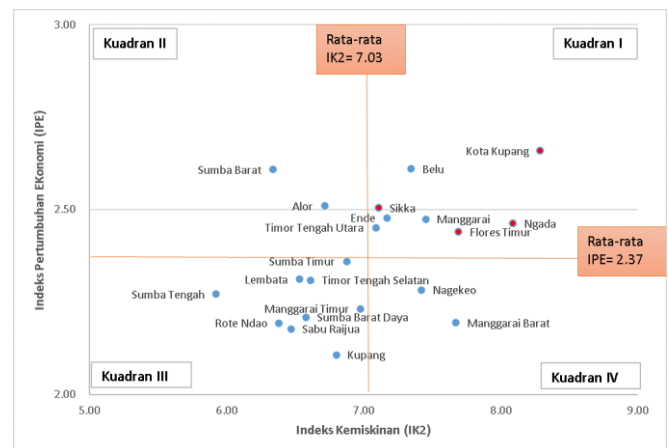


Gambar 3. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IPPE dan IPPK
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

IPPE suatu daerah memiliki hubungan dengan capaian IPPK daerah tersebut. Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah dengan IPPE tinggi cenderung memiliki capaian IPPK yang relatif tinggi (kuadran I) jika dibandingkan dengan indeks NTT, contohnya Kota Kupang, Ngada, Flores Timur dan Sikka. Sementara itu, sebagian daerah memiliki IPPE yang relatif rendah tetapi capaian IPPK relatif tinggi (kuadran II), contohnya Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya. Sebaliknya, sebagian daerah memiliki IPPE relatif tinggi tetapi capaian IPPK relatif rendah (kuadran IV), contohnya Rote Ndao dan Sumba Barat. Oleh karena itu, analisis kuadran menurut sub-pilar IPEI dibutuhkan untuk melihat pola hubungan yang lebih spesifik.



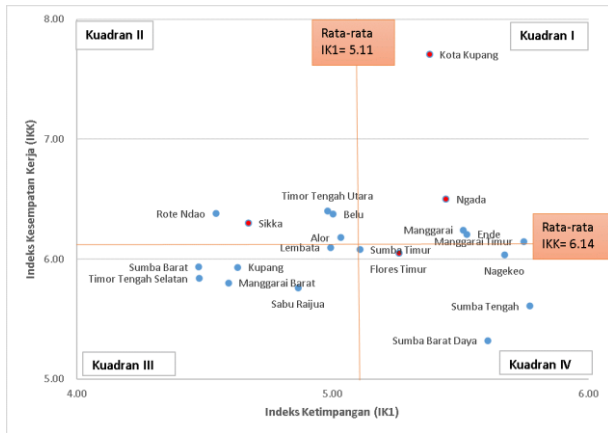
Gambar 4. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK1 dan IPE
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)



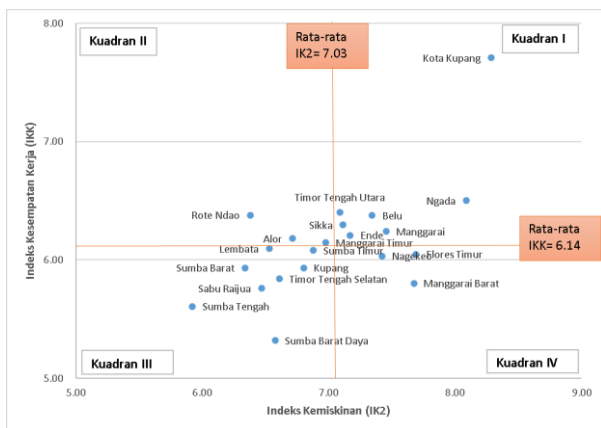
Gambar 5. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK2 dan IPE
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

IPE tinggi tidak selalu diikuti oleh IK1 dan IK2 yang tinggi (Gambar 4 dan 5). Daerah dengan IPE tinggi (seperti Sumba Barat) memiliki capaian IK1 dan IK2 yang rendah (kuadran II). Sebaliknya, terdapat daerah dengan IPE rendah (seperti Nagekeo) memiliki IK1 dan IK2 tinggi (kuadran IV). Hal menarik ditunjukkan oleh Sumba Tengah dengan IPE rendah memiliki IK1 tinggi tetapi IK2 rendah. Sebagian besar daerah tertinggal di NTT memiliki IPE, IK1, dan IK2 yang rendah (kuadran III). Secara umum, daerah dengan IPE yang tinggi memiliki IK2 yang tinggi, tetapi

capaian IK1 bervariasi.



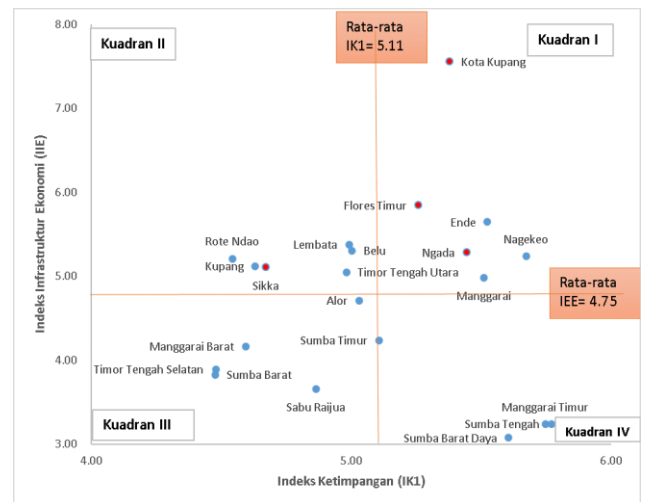
Gambar 6. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK1 dan IKK
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)



Gambar 7. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK2 dan IKK
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Semakin besar kesempatan kerja di suatu daerah maka pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan diharapkan semakin baik. Daerah dengan IKK yang semakin tinggi cenderung memiliki IK2 yang semakin tinggi (Gambar 7) tetapi IK1 relatif bervariasi (Gambar 6). Meskipun demikian, terdapat daerah dengan IKK relatif tinggi (seperti Rote Ndao) tetapi memiliki IK1 dan IK2 relatif rendah (kuadran II). Sebaliknya, terdapat

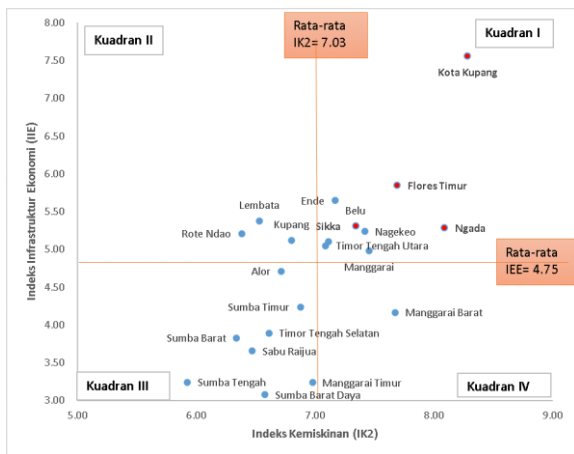
daerah dengan IKK yang rendah (seperti Nagekeo) memiliki capaian IK1 dan IK2 relatif tinggi (kuadran IV). Hal menarik ditunjukkan oleh Manggarai Barat dengan IKK relatif rendah memiliki IK2 relatif tinggi tetapi IK1 relatif rendah. Secara umum, hasil ini sejalan dengan data yang dirilis BPS NTT (2022) dimana daerah dengan tingkat kesempatan kerja dan rata-rata tingkat pendidikan lebih tinggi relatif memiliki rata-rata pendapatan sebulan yang lebih tinggi selama tahun 2015-2021.



Gambar 8. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK1 dan IIE
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

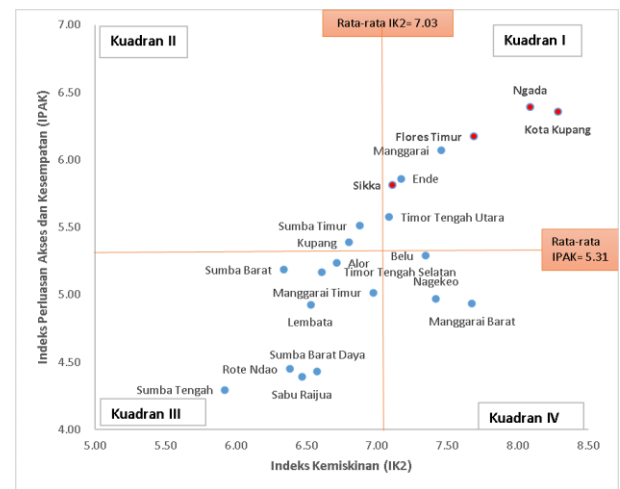
Daerah dengan IIE yang semakin tinggi cenderung memiliki IK2 yang semakin tinggi (Gambar 9) tetapi IK1 relatif bervariasi (Gambar 8). Hal ini sejalan dengan penelitian Christiani & Nainupu (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan akses internet dan penerangan listrik dapat menekan tingkat kemiskinan di NTT. Meskipun demikian, terdapat daerah dengan IIE relatif tinggi (seperti Kabupaten Kupang) tetapi memiliki IK1 dan IK2 relatif rendah (kuadran II). Sebaliknya,

terdapat daerah dengan IIE yang rendah (seperti Sumba Barat Daya) memiliki capaian IK1 relatif tinggi (kuadran IV). Selain itu, Gambar 9 menunjukkan Manggarai Barat merupakan satu-satunya daerah dengan IIE relatif rendah tetapi memiliki IK2 relatif tinggi (kuadran IV).

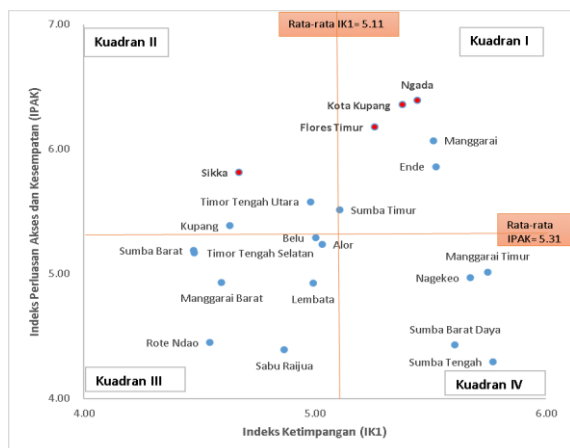


Gambar 9. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK2 dan IIE
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Tengah Utara) tetapi memiliki IK1 dan IK2 relatif rendah (kuadran II). Sebaliknya, terdapat daerah dengan IPAK yang rendah (seperti Manggarai Timur) memiliki capaian IK1 relatif tinggi (kuadran IV). Sebagian besar daerah di NTT dengan IPAK rendah memiliki capaian IK1 dan IK2 yang relatif rendah juga (kuadran III).



Gambar 11. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK1 dan IIE
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)



Gambar 10. Sebaran daerah di NTT berdasarkan Kuadran IK1 dan IIE
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Daerah dengan IPAK yang semakin tinggi cenderung memiliki IK2 yang semakin tinggi (Gambar 11) tetapi IK1 relatif bervariasi (Gambar 10). Meskipun demikian, terdapat daerah dengan IPAK relatif tinggi (seperti Timor

Pola hubungan akses infrastruktur dasar dan kemiskinan telah ditunjukkan data perumahan BPS NTT (2022). Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi relatif memiliki kendala dalam infrastruktur dasar seperti kepemilikan fasilitas tempat buang air besar (BAB). Contohnya, 23 dari 100 rumah tangga di Sumba Tengah (daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTT) tidak memiliki fasilitas BAB tahun 2021. Sebaliknya, hampir tidak ada (0,12 persen) rumah tangga di Kota Kupang (daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTT) yang tidak memiliki fasilitas BAB (BPS, 2022).

Determinan Ketimpangan dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Inklusif

Model persamaan regresi dalam penelitian ini diuraikan menjadi model yang hanya memasukkan variabel bebas utama yaitu IPE, IKK, IIE, dan IPAK (model 1 dan model 3), serta model yang menambahkan RLS sebagai variabel kontrol (model 2 dan model 4). Secara umum, Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif dalam model ini secara simultan signifikan memengaruhi tingkat pemerataan pendapatan (IKI) daerah di NTT. Variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 90 persen dari variasi IKI.

Tabel 2. Hasil Regresi Indeks Pemerataan Pendapatan/Indeks Ketimpangan (IKI)

Variabel	Semua Daerah di NTT		Daerah tertinggal di NTT	
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
IPE	0.4268 (0.2705)	0.6334** (0.3595)	0.2743 (0.2944)	0.3094 (0.3887)
IKK	-0.0501 (0.0549)	-0.0720 (0.0638)	-0.0628 (0.0590)	-0.0668 (0.0649)
IIE	-0.1145* (0.0325)	-0.1610* (0.0543)	-0.1034* (0.0345)	-0.1083 (0.0707)
IPAK	0.0053* (0.0260)	0.0474** (0.0275)	0.0740* (0.0261)	0.0737* (0.0260)
RLS		0.0971 (0.1046)		0.0121 (0.1219)
Constant	4.6665* (0.7684)	3.8538* (1.2080)	4.9111* (0.8174)	4.7912* (1.3043)
Obs	147	147	119	119
R-squared	0.9106	0.9079	0.8991	0.8980
Jarque-Bera	0.3040	0.2040	4.5998	4.6019
F-Statistics	51.7617*	47.7195*	43.6784*	40.6621*

Keterangan

*Signifikan pada level 5%; **Signifikan pada level 10%

Nilai dalam tanda kurung adalah koefisien standar error.

Sumber: Output pengolahan *eviews*

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan semua daerah di NTT signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan (model 2). Semakin tinggi IPE dan IPAK semua daerah di NTT maka semakin tinggi pula capaian IKI. Hal ini sejalan dengan penelitian Kouadio dan Gakpa (2021) yang membuktikan pertumbuhan ekonomi dapat membantu secara signifikan mengurangi ketimpangan di kawasan Afrika Barat. Meskipun demikian, hal ini berbeda dengan hasil penelitian di Indonesia oleh Putri *et al.* (2015) dan Wijayanto *et al.* (2016) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Perbedaan hasil temuan itu sebenarnya telah dijelaskan oleh Todaro (2004) bahwa pada jangka pendek pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh ketimpangan pendapatan tetapi pada jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Perluasan akses dan kesempatan mendorong peningkatan pemerataan pendapatan semua daerah di NTT. Hal ini sejalan dengan temuan Mushtaq dan Bruneau (2019) dimana peningkatan inklusi keuangan akan menurunkan tingkat ketimpangan. Penelitian tersebut juga mengulas bahwa infrastruktur informasi dan komunikasi serta kolaborasinya dengan sektor keuangan dapat mendorong inklusi keuangan yang pada akhirnya menekan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya penelitian ini

(Tabel 2) menemukan IIE berpengaruh negatif terhadap IK1. Indikasi temuan ini telah ditunjukkan oleh Gambar 8. Sebagian besar daerah dengan IEE tinggi memiliki IK1 yang rendah (kuadran II). Sementara itu, 3 daerah dengan IEE terendah (Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya) justru memiliki IK1 yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tidak signifikan menekan tingkat ketimpangan di daerah tertinggal (model 3 dan 4). Indikasi akan hal ini sebelumnya telah ditunjukkan oleh Gambar 4 dimana sebagian daerah dengan IPE relatif tinggi memiliki IK1 yang relatif rendah, seperti Sumba Barat, Sikka, Belu, Alor, dan Timor Tengah Utara. Hal yang menarik adalah besarnya pengaruh IPAK terhadap peningkatan IK1 di daerah tertinggal lebih besar dibandingkan semua daerah di NTT. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, dan inklusi keuangan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan daerah tertinggal di NTT.

Determinan Kemiskinan dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pengurangan kemiskinan semua daerah maupun daerah tertinggal di NTT signifikan dipengaruhi oleh kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan. Peningkatan IKK, IIE, dan IPAK akan mendorong pengurangan kemiskinan (IK2). Hal ini sejalan dengan

temuan Mushtaq dan Bruneau (2019) yang menunjukkan bahwa perluasan akses dan kesempatan dari sisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta inklusi keuangan akan menekan tingkat kemiskinan. Sementara itu, penelitian di Indonesia oleh Sunusi (2014) dan Vera *et al.* (2016) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesempatan kerja akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Hasil Regresi Indeks Pengurangan Kemiskinan/Indeks Kemiskinan (IK2)

Variabel	Semua Daerah di NTT		Daerah tertinggal di NTT	
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
IPE	0.2370 (0.6398)	0.3541 (0.6912)	0.3036 (0.5396)	0.3752 (0.5981)
IKK	0.2814* (0.0900)	0.2598* (0.0976)	0.3071* (0.0874)	0.2954* (0.0974)
IIE	0.3688* (0.0830)	0.3227* (0.0801)	0.3759* (0.0763)	0.3468* (0.0752)
IPAK	0.2422* (0.0327)	0.2309* (0.0340)	0.2496* (0.0358)	0.2436* (0.0379)
RLS		0.1087 (0.1024)		0.0666 (0.1046)
Constant	1.6980* (1.5880)	1.0404* (1.9096)	1.3317* (1.3100)	0.9286* (1.6389)
obs	147	147	119	119
R-squared	0.9289	0.9219	0.9326	0.9254
Jarque-Bera	4.5939	4.2634	4.6421	4.6879
F-Statistics	66.4172	57.1394	67.7484	57.2737

Keterangan

*Signifikan pada level 5%; **Signifikan pada level 10%

Nilai dalam tanda kurung adalah koefisien standar error.

Sumber: Output pengolahan *eviews*

Indikasi pengaruh positif IKK, IIE, dan IPAK terhadap IK2 telah ditunjukkan sebelumnya oleh kuadran hubungan antar variabel tersebut. Gambar 7, Gambar 8, dan Gambar 9 menunjukkan semakin tinggi IKK, IIE, dan IPAK suatu daerah maka capaian IK2 akan semakin tinggi. Kota Kupang adalah salah satu daerah dengan IKK, IIE, dan IPAK tinggi

serta memiliki capaian IK2 yang tinggi di NTT. Sebaliknya, Sumba Tengah adalah salah satu daerah dengan IKK, IIE, dan IPAK rendah serta memiliki capaian IK2 yang rendah di NTT.

Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mengurangi kemiskinan semua daerah maupun daerah tertinggal di NTT. Eastwood dan Lipton (2001) diikuti oleh Donaldson (2008) dengan menggunakan data yang sama dengan Kraay (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menguntungkan orang miskin. Ncube *et al.* (2014) juga menemukan hasil yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah (MENA). Hasil negatif atau tidak signifikan antara pertumbuhan dan kemiskinan juga ditemukan oleh Balisacan *et al.* (2003) untuk Indonesia

4. Simpulan dan Saran

Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, faktor yang signifikan menjadi determinan tingkat pemerataan pendapatan semua daerah di NTT adalah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan memengaruhi tingkat ketimpangan daerah tertinggal di NTT. Sementara itu, faktor yang signifikan menjadi determinan tingkat pengurangan kemiskinan semua daerah di NTT adalah kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan.

Pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses dan kesempatan berpengaruh positif terhadap pemerataan pendapatan daerah di NTT. Sebaliknya, infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pemerataan pendapatan. Sementara itu, kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, tingkat kesempatan kerja dan infrastruktur ekonomi, serta perluasan akses dan kesempatan berperan lebih besar dalam menekan ketimpangan dan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara mendorong optimalisasi kesempatan kerja adalah program *digital talent hub* melalui pelatihan, *mentoring*, *coaching*, dan pengembangan kewirausahaan di bidang digital dan digital kreatif, bukan hanya di Kota Kupang, melainkan juga di seluruh daerah tertinggal di NTT. Selain itu, akselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi (seperti listrik, jaringan informasi dan telekomunikasi, dan jalan raya) di daerah tertinggal harus menjadi prioritas utama untuk menekan ketimpangan pendapatan. Hal menarik dari hasil penelitian ini adalah peranan faktor perluasan akses dan kesempatan yang dapat menekan kemiskinan dan ketimpangan sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng lembaga keuangan konvensional maupun digital untuk membantu literasi keuangan dan

mempermudah akses kredit usaha, khususnya di daerah tertinggal.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini baik dari sisi cakupan indikator yang dianalisis maupun metodologi yang digunakan. Dari sisi cakupan indikator, penelitian selanjutnya diharapkan melakukan disagregasi semua pilar IPEI ke dalam bentuk indikator agar analisis yang dihasilkan lebih spesifik. Selain itu, tidak tersedianya data kabupaten Malaka dalam *dataset* penelitian ini menjadi kesempatan untuk penelitian selanjutnya memperbaiki cakupan observasi baik di tingkat Provinsi NTT atau mengembangkan ke regional lain. Dari sisi metodologi yang digunakan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengakomodasi efek spasial dengan menggunakan model regresi spasial.

Daftar Pustaka

- Adeleye, B. N., Gershon, O., Ogundipe, A., Owolabi, O., Ogunrinola, I., & Adediran, O. (2020). *Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in Sub-Saharan Africa and Latin American and Caribbean Countries*. *Heliyon*, 6(12), e05631.
- Aidha, C. N., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Herawati, H., Ramdlaningrum, H., Ramdlaningrum, M., & Thariq, W. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018.
- Anand, R., Tulin, M. V., & Kumar, N. (2014). India: *Defining and explaining inclusive growth and poverty reduction*. *International Monetary Fund*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). *Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan*. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Balisacan, A. M., Pernia, E. M., & Asra, A. (2003). *Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: What do subnational data show?* *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39, 329–351.
- Christiani, N. V., & Nainupu, A. E. (2021). Pengaruh Akses Terhadap Internet, Listrik dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019. *Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214)*, 1(1), 37-52.
- Donaldson, J. A. (2008). *Growth is good for whom, when how? Economic growth and poverty reduction in exceptional cases*. *World Development*, 36, 2127–2143.
- Eastwood, R., & Lipton, M. (2001). *Pro-poor growth and pro-growth poverty reduction: What do they mean? What does the evidence mean? What can policymakers do?* *Asian Development Review*, 19, 1–37.
- Ekananda, M. (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel. Edisi ke-2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Fosu, A. K. (2015). *Growth, inequality and poverty in Sub-Saharan Africa: recent progress in a global context*. *Oxford Development Studies*, 43(1), 44-59.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (7th ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis*. England.
- Haan De , A., & Thorat, S. (2013). *Inclusive growth: More than safety nets*. *International Development Research Centre*, Ottawa.
- <http://inklusif.bappenas.go.id/> (diakses pada 11 April 2022)
- <https://ntt.bps.go.id/> (diakses pada 10 April 2022)
- <https://setkab.go.id/> (diakses pada 10 April 2022)
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111-126.
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). *What is pro-poor growth?. Asian development review*, 18(1), 1-16. <https://mpru.ub.uni-muenchen.de/104987/1/What%20is%20Pro-poor%20Growth.pdf>
- Kouadio, H. K., & Gakpa, L. L. (2021). *Do economic growth and institutional quality reduce poverty and inequality in West Africa?* *Journal of Policy Modeling*. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.09.010>
- Kraay, A. (2004). *When is growth pro-poor? Cross-country evidence*. *International Monetary Fund Working Paper* 47.
- McKinley, T. (2010). *Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress*.
- Mushtaq, R., & Bruneau, C. (2019). *Microfinance, financial inclusion and ICT: Implications for poverty and inequality*. *Technology in Society*, 59, 101154. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101154>
- Ncube, M., Anyanwu, J. C., & Hausken, K. (2014). *Inequality, economic growth and poverty in the Middle East and North Africa (MENA)*. *African Development Review*, 26(3), 435-453.
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/5348>
- Ramos, R. A., Ranieri, R., & Lammens, J. W. (2013). *Mapping Inclusive Growth*. *International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)*

- Working Paper*, (No. 105).
- Sunusi, D. (2014). Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Todaro P Michael. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerjemah: Haris Munandar. Erlangga.
- UNDP. (2017). *UNDP's Strategy for Inclusive and Sustainable Growth*. New York: UNDP
- Vera Sisca, H. S., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(4).
- Wagle, U. R. (2016). *How much do social protections matter to poverty and inequality? An insight from Asian experiences*. *Global Social Policy*
- Wijayanto, A. T., Rumagit, G., & Suzana, B. O. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/arti cle/view/12569>
- Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage learning.
- Wu, A. M., & Ramesh, M. (2014). *Poverty reduction in urban China: The impact of cash transfers*. *Social Policy and Society*, 13(2), 285-299.